

ABSTRAK

Penerapan hukum waris perdata dalam pembagian harta gono-gini terhadap hak ahli waris dari perkawinan poligami (Studi Putusan Nomor 305/PK/Pdt/2017). Sebuah perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing. Dari adanya hubungan perkawinan menimbulkan suatu ikatan antara seorang suami dengan istri dan anak-anaknya menjadikan mereka memiliki hak untuk melakukan kegiatan waris-mewaris. Dalam permasalahan hukum perdata di Indonesia salah satu yang sering terjadi perselisihan yaitu permasalahan mengenai sengketa kewarisan. Bagaimana penerapan hukum mengenai pembagian harta warisan terhadap para ahli waris dalam perkawinan poligami berdasarkan putusan nomor 305/PK/Pdt/2017 dan Bagaimana analisis pelaksanaan pembagian harta gono-gini kepada para ahli waris berdasarkan putusan nomor 305/PK/Pdt/2017 ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Untuk mengetahui penerapan hukum mengenai pembagian harta warisan terhadap para ahli waris dalam perkawinan poligami berdasarkan putusan nomor 305/PK/Pdt/2017 dan Untuk mengetahui analisis pelaksanaan pembagian harta gono-gini kepada para ahli waris berdasarkan putusan nomor 305/PK/Pdt/2017 ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Metode penelitian Penulis adalah metode penelitian hukum normatif, penelitian berdasarkan data-data yang didapat melalui studi kepustakaan. Dalam Putusan Perkara No. 305/PK/Pdt/2017 amar putusan yang di tetapkan oleh hakim menurut Penulis kurang tepat. Karena seharusnya istri kedua dari Tony Chandra yaitu Zuliyanti beserta anak-anaknya tidak berhak atas pembagian waris dari pewaris. Hal itu karena perkawinan antara Tony Chandra dengan Zulianti tidak sah akibat perkawinan tersebut melanggar asas monogami mutlak. Maka yang berhak menjadi ahli waris terhadap harta peninggalan Pewaris yaitu istri pertama dari Pewaris beserta 6 Orang anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Kata Kunci : Penerapan Hukum, Perdata, Perkawinan, Waris